Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Vol 05 No 02 Agustus 2024 (1-13)
https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index
Prefix 10.47134

Integrasi Komunikasi Pemerintahan Digital Melalui Situs Web Resmi: Studi Kasus di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk

Kisman Karinda[1]*, Adrian Kede[2], Gisela Luigi Septiana[3], La Ode Sabirila Jayalangi[4], Sahraen Sibay[5], Maria Ulfa[6]

[1,4,5,] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Luwuk; kismankarinda35@gmail.com, laodesabirila38@gmail.com, rosmasahraen@gmail.com,
[2,3,6] Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Luwuk; adriankede1382@gmail.com, giselaseptiana300@gmail.com, mariiia.ulfa@icloud.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki integrasi komunikasi pemerintahan digital melalui situs web resmi Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan situs web resmi sebagai sumber data utama. Data dianalisis melalui analisis tematik untuk mengungkapkan berbagai aspek komunikasi digital yang diterapkan oleh pemerintah desa. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi komunikasi pemerintahan digital telah meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas layanan publik. Melalui penyajian informasi tentang aktiviatas pemerintah desa, integrasi media sosial, dan fitur interaktif seperti survei, pemerintah desa berhasil memperkuat hubungan dengan masyarakat dan membangun fondasi yang lebih kuat bagi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif di tingkat desa. Kesimpulannya, transformasi digital dalam pemerintahan lokal membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas informasi dan partisipasi warga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi komunikasi pemerintahan digital sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Katakunci: Pemerintahan Desa: Komunikasi Pemerintahan, Pemerintahan Digital

DOI:
https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.110
*Correspondence: Kisman Karinda
Email: kismankarinda35@gmail.com

Received: 08-05-2024
Accepted: 14-07-2024
Published: 27-08-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *The aim of this research is to investigate the integration of digital government communications through the official website of Tontouan Village, Luwuk District. The research method used is qualitative using the official website as the main data source. Data was analyzed through thematic analysis to reveal various aspects of digital communication implemented by village governments. The main findings show that the integration of digital government communications has increased transparency, citizen participation and the effectiveness of public services. Through providing information about village government activities, social media integration, and interactive features such as surveys, village governments have succeeded in strengthening relationships with the community and building a stronger foundation for inclusive and responsive governance at the village level. In conclusion, digital transformation in local government has a significant positive impact in improving the quality of life of the community through increasing information accessibility and citizen participation. Thus, this research confirms the importance of integrating digital government communications as a means of strengthening relations between government and society, as well as increasing the effectiveness of government governance at the local level.*

Keyword: *Village Government: Government Communication, Digital Government*

Pendahuluan

Tren adopsi transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam perubahan yang signifikan dalam tatakelola pemerintahan di berbagai negara (Hardi & Gohwong, 2020; Song & Lee, 2016; Ullah et al., 2021). Salah satu dampak paling mencolok adalah dalam peningkatan efisiensi operasional dan penyediaan layanan publik (Ibrahim et al., 2023). Melalui digitalisasi, beragam proses administratif dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat (Abdulkareem et al., 2022; Cestnik & Kern, 2014; Lee & Porumbescu, 2019; Twizeyimana & Andersson, 2019). Dengan adopsi sistem informasi terintegrasi dan teknologi otomatisasi, pemerintah dapat menyederhanakan proses-proses kompleks dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Manfaat transformasi digital dalam tatakelola pemerintahan tidak hanya terbatas pada efisiensi operasional. Hal ini juga membuka pintu bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Selain itu, adopsi transformasi digital juga memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan layanan publik yang lebih inovatif dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan Internet of Things (IoT), pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Misalnya, implementasi sistem e-government memungkinkan warga untuk mengakses layanan pemerintah secara online, mulai dari pembayaran pajak hingga pengajuan dokumen resmi, yang secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk berinteraksi dengan pemerintah. Ini semua menciptakan fondasi yang kokoh untuk masyarakat yang lebih terhubung, efisien, dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan (Ahn & Bretschneider, 2011; Robles et al., 2022; Yang & Rho, 2007; Zorali & Kanipek, 2023).

Salah satu aspek terpenting dari transformasi digital dalam tatakelola pemerintahan adalah penggunaan situs web resmi. Situs web ini menjadi jendela utama bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Dengan menyediakan informasi yang terperinci tentang kebijakan, program, dan layanan yang mereka tawarkan, situs web resmi memungkinkan akses yang lebih mudah bagi warga untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus menghadiri kantor pemerintah secara fisik. Ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga memberikan transparansi yang lebih besar tentang aktivitas dan keputusan pemerintah kepada publik (Nawafleh, 2018; Paul & Das, 2020; Thompson et al., 2020).

Selain itu, situs web resmi juga menjadi platform untuk interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menyediakan formulir online, forum diskusi, atau saluran komunikasi lainnya, pemerintah dapat menerima umpan balik langsung dari warga mengenai kebijakan atau layanan yang mereka berikan. Ini membuka pintu untuk keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan dan

memungkinkan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi warga secara lebih efektif. Dengan demikian, situs web resmi tidak hanya menjadi alat penting dalam menyebarkan informasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menjadikannya salah satu pilar utama dari transformasi digital dalam tatakelola pemerintahan (Baharuddin et al., 2022; Cheng & Chen, 2023; Liang & Wang, 2023; Rosenberg, 2024).

Situs web resmi pemerintah menjadi pilar utama dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, karena menyediakan platform yang mudah diakses dan transparan untuk pertukaran informasi (Cheng & Chen, 2023; Liang & Wang, 2023). Dengan menyajikan kebijakan, program, dan layanan secara terperinci, situs web memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi warga untuk mendapatkan informasi tanpa hambatan fisik. Lebih dari sekadar menyediakan informasi, situs web juga menciptakan saluran komunikasi dua arah, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan umpan balik, pertanyaan, atau kekhawatiran mereka kepada pemerintah dengan cepat dan efisien. Dalam konteks ini, situs web resmi bukan hanya sebagai jendela, tetapi sebagai pintu gerbang bagi partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, Sulawesi Tengah, di mana pemerintahnya juga mengadopsi penggunaan situs web resmi sebagai alat penting dalam tatakelola pemerintahannya. Situs web resmi Desa Tontouan memberikan akses yang lebih mudah bagi penduduk setempat untuk mendapatkan informasi terkini tentang kegiatan pemerintah, kebijakan, program pembangunan, serta layanan publik yang tersedia. Dengan adanya situs web resmi, penduduk Desa Tontouan dapat dengan cepat dan mudah memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan desa. Selain itu, situs web tersebut juga menjadi wadah bagi interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, memungkinkan penduduk untuk memberikan masukan, saran, atau keluhan secara online, sehingga memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Secara umum, situs web adalah sebuah halaman atau kumpulan halaman yang diakses melalui internet dan disajikan dalam bentuk teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari semuanya. Situs web berfungsi sebagai wadah untuk menyajikan informasi, produk, atau layanan kepada pengguna internet. Biasanya, situs web terdiri dari berbagai halaman yang terhubung satu sama lain melalui tautan atau hyperlink, membentuk struktur navigasi yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi berbagai konten yang disediakan. Situs web dapat digunakan oleh berbagai entitas, termasuk individu, bisnis, organisasi, dan pemerintah, untuk berbagai tujuan seperti informasi, promosi, penjualan, komunikasi, dan interaksi dengan pengguna (Chowdhury et al., 2024; Knock et al., 2024; Sedhain et al., 2024). Dengan berkembangnya teknologi digital, situs web telah menjadi

salah satu alat utama dalam berbagai bidang, seperti pemasaran, pendidikan, komunikasi, dan pelayanan publik.

Tren adopsi transformasi digital telah mengubah lanskap tatakelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, di mana pemerintah di berbagai tingkatan semakin mengadopsi penggunaan situs web resmi sebagai sarana komunikasi dan penyedia layanan publik yang efisien. Situs web resmi memungkinkan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, berinteraksi dengan pemerintah, dan memberikan masukan secara online. Di Desa Tontouan, Sulawesi Tengah, penggunaan situs web resmi juga telah menjadi bagian integral dari upaya pemerintah desa untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan lokal. Dengan demikian, situs web resmi tidak hanya menjadi alat penting dalam transformasi digital tatakelola pemerintahan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan responsif.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang integrasi komunikasi pemerintahan digital melalui situs web resmi di tingkat nasional atau kota besar, terdapat kekurangan dalam penelitian yang secara khusus fokus pada tingkat lokal, seperti di tingkat desa. Studi kasus di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, menjadi penting karena dapat mengisi celah pengetahuan tentang bagaimana pemerintahan desa secara konkret mengintegrasikan komunikasi digital melalui situs web resmi dalam tatakelola pemerintahannya. Penelitian semacam ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan, peluang, dan dampak dari penerapan teknologi digital dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi integrasi komunikasi pemerintahan digital melalui situs web resmi di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana pemerintah desa memanfaatkan situs web resmi dalam upaya meningkatkan aksesibilitas informasi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas layanan publik. Manfaatnya meliputi penyediaan wawasan yang lebih baik tentang penggunaan teknologi digital dalam konteks pemerintahan desa, identifikasi tantangan yang dihadapi dalam integrasi komunikasi digital, serta penyediaan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari penggunaan situs web resmi dalam tatakelola pemerintahan desa.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan sumber data utama yang berasal dari situs resmi pemerintah Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk (https://www.desatontouan.com/). Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap konten yang tersedia di situs web tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi berbagai

tema dan isu yang tercermin dalam konten situs web, seperti informasi tentang kebijakan pemerintah, program pembangunan, layanan publik yang tersedia, serta mekanisme partisipasi masyarakat.

Proses analisis tematik melibatkan pencarian pola-pola tematik yang muncul dari konten situs web, serta identifikasi hubungan antara tema-tema tersebut. Langkah-langkah analisis juga mencakup pengelompokan dan klasifikasi informasi yang ditemukan dalam kategori-kategori yang relevan, untuk kemudian dieksplorasi lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana komunikasi pemerintahan digital diimplementasikan melalui situs web resmi Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan efektivitas layanan publik di tingkat lokal.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan perangkat lunak Nvivo 12 Plus. Nvivo 12 Plus berperan dalam membantu pengelompokan, klasifikasi, dan analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan dari situs web resmi pemerintah Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk. Dengan fitur-fitur yang disediakan, seperti kemampuan untuk mengidentifikasi pola-pola tematik, melakukan pencarian teks yang cermat, dan memfasilitasi pengelolaan data yang kompleks, Nvivo memberikan dukungan yang signifikan dalam menggali wawasan mendalam dari konten situs web tersebut. Dengan demikian, penggunaan Nvivo 12 Plus menjadi tambahan yang berharga dalam memperkuat analisis tematik dan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi komunikasi pemerintahan digital dengan lebih terperinci dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Situs web resmi di Desa Tontouan dikelola langsung oleh pemerintah desa sebagai platform utama untuk berkomunikasi, menyediakan informasi, dan menyampaikan layanan kepada penduduk setempat. Penggunaan tangkapan layar dari situs web resmi pemerintah Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, sebagai bagian dari penelitian ini memberikan keuntungan tambahan dalam menggambarkan konteks komunikasi pemerintahan digital yang terdapat di situs tersebut. Tangkapan layar dapat mengabadikan tampilan situs web pada titik waktu tertentu, memperlihatkan informasi yang tersedia, struktur tata letak, serta elemen visual dan desain yang mendukung komunikasi. Dengan demikian, tangkapan layar tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan gambaran visual yang lebih lengkap dan representatif dari situs web, yang dapat membantu memperkuat analisis tematik dan pemahaman tentang bagaimana informasi disajikan dan diakses oleh pengguna situs web tersebut.

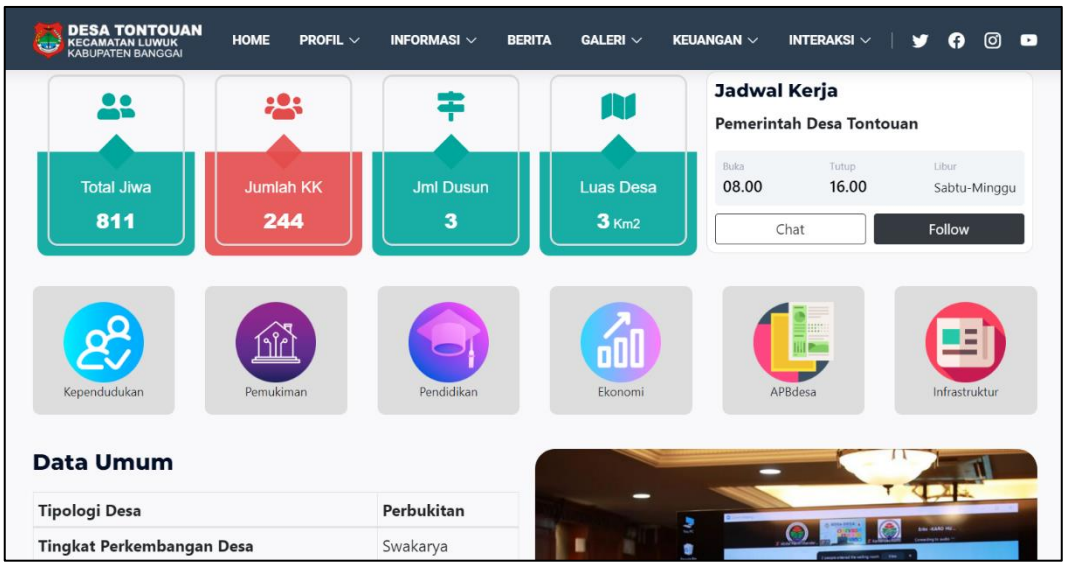

Gambar 1. Tangkapan layar situs web resmi pemerintah Desa Tontouan.
Sumber: www.desatontouan.com, 2024

Gambar 1 menampilkan beragam menu pilihan yang dapat diakses oleh publik melalui situs web resmi Desa Tontouan, mencakup Profil, Informasi, Berita, Galeri, Keuangan, dan Interaksi. Menu "Profil" berisi informasi tentang sejarah, demografi, dan struktur pemerintahan Desa Tontouan, memberikan gambaran umum kepada pengunjung tentang karakteristik dan keberadaan desa tersebut. Sementara itu, menu "Informasi" menyediakan rincian tentang layanan publik yang tersedia, prosedur administratif, dan kontak penting untuk mengakses berbagai layanan atau menghubungi pemerintah desa. Menu "Berita" menjadi sumber utama informasi terkini tentang kegiatan, proyek, atau acara yang sedang berlangsung di Desa Tontouan, memungkinkan masyarakat untuk tetap *up-to-date* dengan perkembangan terbaru dalam lingkup desa.

Sementara itu, menu "Galeri" berisi koleksi foto atau video yang menampilkan berbagai kegiatan atau acara di desa tersebut, memberikan pandangan visual yang menarik tentang kehidupan dan budaya lokal. Di sisi lain, menu "Keuangan" menyajikan informasi tentang anggaran, belanja, atau laporan keuangan desa, memperlihatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa kepada masyarakat. Terakhir, menu "Interaksi" berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik, saran, atau pengaduan kepada pemerintah desa, memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Dengan demikian, melalui berbagai menu pilihan ini, situs web Desa Tontouan bertujuan untuk memberikan akses yang komprehensif dan transparan kepada masyarakat tentang informasi, layanan, dan interaksi dengan pemerintah desa. Adapun salah satu isi informasi dari salah satu menu tersebut dilihat pada Gambar 2.

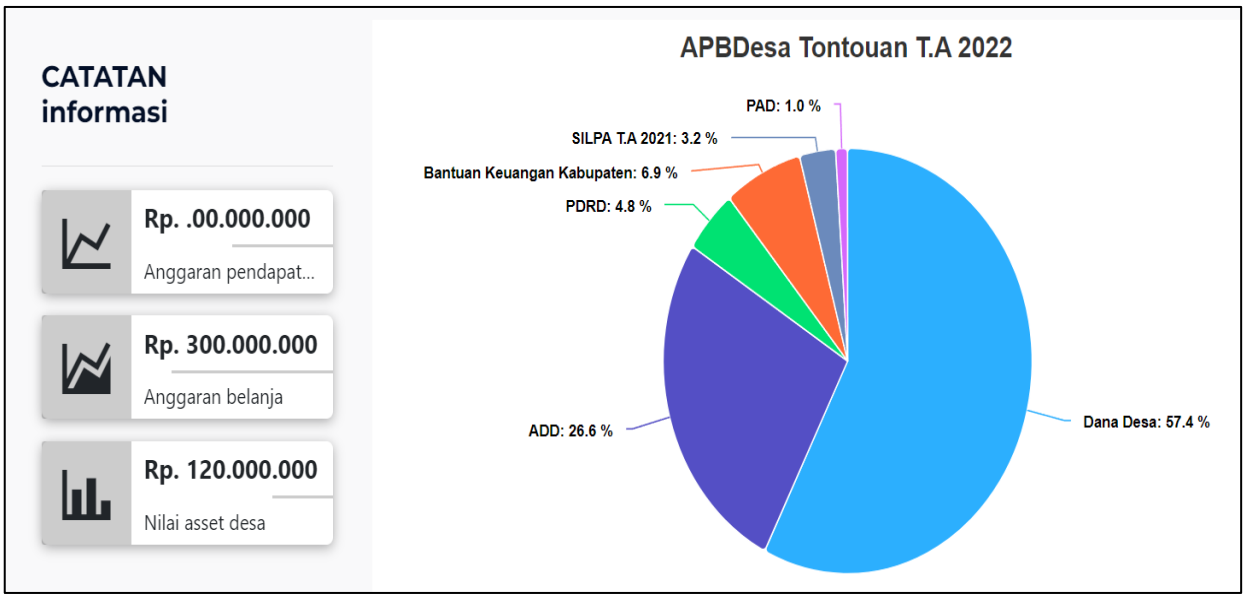

Gambar 2. Tangkapan layar situs web resmi pemerintah Desa Tontouan terkait isi informasi.
Sumber: www.desatontouan.com, 2024

Gambar 2 menampilkan tangkapan layar situs web resmi pemerintah Desa Tontouan yang berfokus pada isi informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) desa. Informasi tentang APBD desa merupakan bagian penting dari transparansi keuangan dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakatnya (Azizah & Kholifah R, 2023; Tumiwa et al., 2021). Dengan menyajikan informasi tersebut melalui situs web resmi, pemerintah desa memberikan akses yang lebih mudah bagi warga untuk memahami alokasi dana publik dan melacak penggunaannya, meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Penghadiran informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di situs web resmi pemerintah Desa Tontouan menandakan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui platform online ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses rincian tentang bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya meningkatkan tingkat transparansi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dan pengawasan yang lebih baik dari warga dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dengan informasi yang tersedia secara terbuka, masyarakat dapat memahami prioritas pengeluaran desa, mengidentifikasi proyek-proyek yang sedang dilaksanakan, dan secara efektif memberikan masukan serta umpan balik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD desa (Adelia & Harahap, 2022; Pratama et al., 2021). Ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, inklusif, dan

akuntabel di mana masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

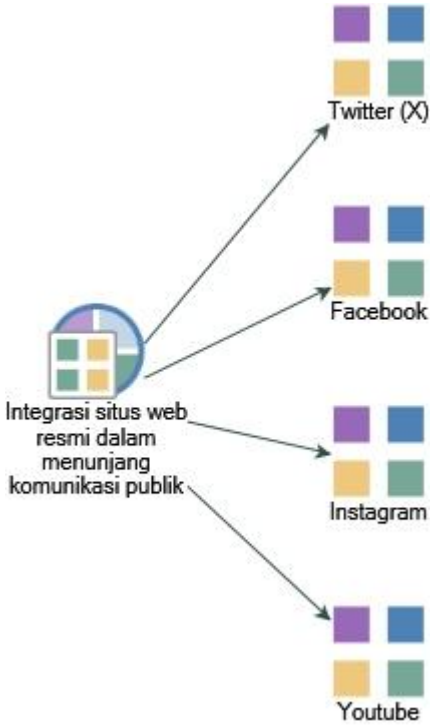

Gambar 3. Integrasi situs web dengan media sosial.
Sumber: Diolah penulis dengan Nvivo 12 Plus, 2024

Gambar 3 menyoroti integrasi situs web resmi pemerintah Desa Tontouan dengan berbagai platform media sosial, termasuk Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube, sebagai bagian dari upaya pembangunan komunikasi publik yang lebih luas. Integrasi ini memperluas jangkauan komunikasi pemerintah desa dengan memanfaatkan beragam kanal yang digunakan secara luas oleh masyarakat dalam berinteraksi dan berbagi informasi. Melalui Twitter, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi singkat dan pembaruan terkini kepada masyarakat, sementara platform seperti Facebook dan Instagram memungkinkan pemerintah desa untuk membagikan konten visual, seperti foto dan video, yang dapat lebih menarik perhatian publik. Selain itu, keberadaan di Youtube memungkinkan pemerintah desa untuk mempublikasikan video-video resmi, seperti rekaman acara atau penjelasan kebijakan, yang dapat diakses oleh masyarakat secara online, menyediakan lebih banyak opsi bagi warga Desa Tontouan untuk terlibat dan terhubung dengan pemerintah desa mereka secara digital. Dengan demikian, integrasi situs web dengan media sosial menjadi strategi penting dalam memperkuat komunikasi publik, memperluas cakupan informasi, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

Integrasi situs web resmi pemerintah Desa Tontouan dengan platform media sosial juga membuka peluang untuk interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui komentar, pesan langsung, atau tanggapan terhadap postingan, warga dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi, memberikan umpan balik, dan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah desa. Hal ini tidak hanya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, dengan memberikan kesempatan bagi warga untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Dengan demikian, integrasi media sosial dengan situs web resmi tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga membangun jaringan komunikasi yang lebih inklusif dan responsif antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkelanjutan di tingkat lokal.

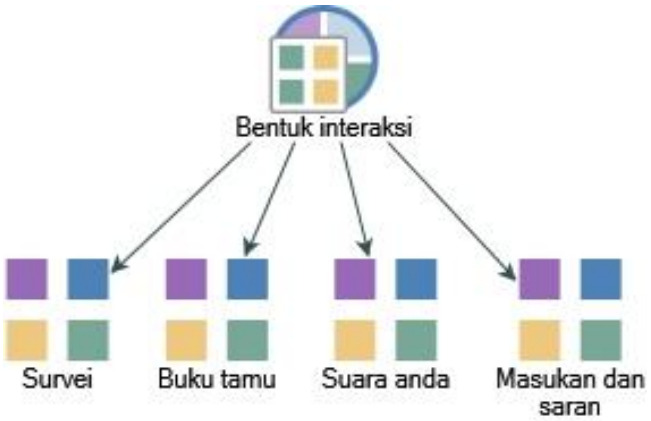

Gambar 4. Bentuk interksi.
Sumber: Diolah penulis dengan Nvivo 12 Plus, 2024

Gambar 4 menampilkan berbagai bentuk interaksi yang difasilitasi melalui situs web resmi pemerintah Desa Tontouan, antara lain survei, buku tamu, suara Anda, masukan, dan saran. Survei memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data atau pendapat terkait berbagai isu yang relevan dengan pembangunan desa. Sementara itu, buku tamu menyediakan wadah bagi pengunjung situs web untuk meninggalkan pesan, komentar, atau kesan mereka tentang layanan atau kegiatan pemerintah desa. Fitur "Suara Anda" memungkinkan warga Desa Tontouan untuk menyuarakan aspirasi, harapan, atau masalah yang dihadapi secara langsung kepada pemerintah desa, sedangkan bagian masukan dan saran memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi, saran, atau kritik yang konstruktif untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam tatakelola pemerintahan desa. Melalui berbagai bentuk interaksi ini, situs web resmi menjadi sarana yang inklusif dan responsif,

memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desa.

Secara keseluruhan, diskusi mengenai integrasi komunikasi pemerintahan digital melalui situs web resmi Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah desa memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, transparansi, dan efektivitas layanan publik. Dengan menerapkan berbagai fitur dan strategi, seperti menyajikan informasi tentang APBD, mengintegrasikan media sosial, dan menyediakan wadah untuk interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, situs web resmi Desa Tontouan menjadi sebuah contoh yang mengilustrasikan bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan tatakelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan inklusif di tingkat lokal.

Kesimpulan

Dalam studi kasus ini, temuan utama menunjukkan bahwa integrasi komunikasi pemerintahan digital melalui situs web resmi Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas layanan publik. Melalui penyajian informasi yang terperinci, pemerintah desa berhasil meningkatkan akuntabilitas dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau aktivitas pemerintah desa. Selain itu, integrasi media sosial memperluas jangkauan komunikasi pemerintah dengan masyarakat, sementara fitur interaktif seperti survei, buku tamu, dan masukan memfasilitasi partisipasi aktif dan pengiriman umpan balik langsung dari masyarakat. Kesimpulan utamanya adalah bahwa teknologi informasi, khususnya melalui situs web resmi, telah menjadi katalisator penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta membangun fondasi yang lebih kokoh bagi tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan responsif di tingkat desa.

Selain itu, studi ini juga menyoroti pentingnya adopsi strategi komunikasi digital yang holistik dan terintegrasi dalam konteks pemerintahan lokal. Integrasi berbagai fitur dan platform, mulai dari penyajian informasi yang terstruktur di situs web hingga pemanfaatan media sosial untuk interaksi dua arah, telah membantu Desa Tontouan membangun ekosistem komunikasi yang dinamis dan responsif. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan manfaat dalam penyediaan layanan publik yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, membentuk pondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal. Dengan demikian, kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa transformasi digital dalam tatakelola pemerintahan

membuka peluang besar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di tingkat desa melalui peningkatan aksesibilitas informasi, partisipasi, dan pelayanan yang responsif.

Daftar Pustaka

Abdulkareem, A. K., Abdulkareem, Z. J., Ishola, A. A., & Akindele, I. T. (2022). Does e-government impact e-participation? The influence of trust in e-government. *International Review of Public Administration*, *27*(2), 91–110. https://doi.org/10.1080/12294659.2022.2071540

Adelia, A. P., & Harahap, W. S. M. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organsasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen*, *2*(1), 156–168. https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai/article/view/258

Ahn, M. J., & Bretschneider, S. (2011). Politics of E-Government: E-Government and the Political Control of Bureaucracy. *Public Administration Review*, *71*(3), 414–424. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02225.x

Azizah, D. N., & Kholifah R, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas dalam Pengelolaan APBDes terhadap Kepercayaan Publik. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, *1*(2), 1–9. https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.117

Baharuddin, T., Qodir, Z., & Loilatu, M. J. (2022). Government Website Performance during Covid-19 : Comparative Study Yogyakarta and South Sulawesi , Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, *9*(2), 109–123. https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i2.11474

Cestnik, B., & Kern, A. (2014). Administrative and digital literacy: The legend or myth in e-government. *Innovation and the Public Sector*, *21*, 216–223. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-429-9-216

Cheng, Y. J., & Chen, K. H. (2023). Website analytics for government user behavior during COVID-19 pandemic. *Aslib Journal of Information Management*, *75*(1), 90–111. https://doi.org/10.1108/AJIM-11-2021-0329

Chowdhury, M. A., Rahman, M., & Rahman, S. (2024). Detecting vulnerabilities in website using multiscale approaches: based on case study. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, *14*(3), 2814. https://doi.org/10.11591/ijece.v14i3.pp2814-2821

Hardi, R., & Gohwong, S. (2020). E-Government Based Urban Governance on the Smart City Program in Makassar, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, *1*(1), 12–17. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.10

Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023). Bibliometric Analysis of E-Government and Trust : A Lesson for Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, *19*(3), 269–284. https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1303

Knock, M., Carpenter, D. M., Thomas, K. C., Lee, C., Adjei, A., Lowery, J., Coyne, I., Garcia,

N., & Sleath, B. (2024). Disseminating a health information website to teens using a three-pronged approach with social media outreach. *PEC Innovation*, *4*(May), 100288. https://doi.org/10.1016/j.pecinn.2024.100288

Lee, J. B., & Porumbescu, G. A. (2019). Engendering inclusive e-government use through citizen IT training programs. *Government Information Quarterly*, *36*(1), 69–76. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.007

Liang, B., & Wang, Y. (2023). Using integrated marketing communications to promote country personality via government websites. *Place Branding and Public Diplomacy*, *19*(1), 79–92. https://doi.org/10.1057/s41254-021-00221-7

Nawafleh, S. (2018). Factors affecting the continued use of e-government websites by citizens: An exploratory study in the Jordanian public sector. *Transforming Government: People, Process and Policy*, *12*(3–4), 244–264. https://doi.org/10.1108/TG-02-2018-0015

Paul, S., & Das, S. (2020). Accessibility and usability analysis of Indian e-government websites. *Universal Access in the Information Society*, *19*(4), 949–957. https://doi.org/10.1007/s10209-019-00704-8

Pratama, E. A., Firmansyah, R. N., Rini, W. P., & Khoeroh, A. S. (2021). Pengembangan Aplikasi Transparansi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal INSAN: Journal of Information System Management Innovation*, *1*(2), 96–102. https://doi.org/10.31294/jinsan.v1i2.697

Robles, J. M., Torres-Albero, C., & Villarino, G. (2022). Inequalities in digital welfare take-up: lessons from e-government in Spain. *Policy Studies*, *43*(5), 1096–1111. https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1929916

Rosenberg, D. (2024). Older adults' e-government use for bureaucratic and transactional purposes: the role of website-related perceptions and subjective digital skills. *Transforming Government: People, Process and Policy*, *May*, 2024. https://doi.org/10.1108/TG-08-2023-0116

Sedhain, A., Diwanji, V., Solomon, H., Leon, S., & Kuttal, S. K. (2024). Developers' information seeking in Question & Answer websites through a gender lens. *Journal of Computer Languages*, *79*(May), 101267. https://doi.org/10.1016/j.cola.2024.101267

Song, C., & Lee, J. (2016). Citizens Use of Social Media in Government, Perceived Transparency, and Trust in Government. *Public Performance and Management Review*, *39*(2), 430–453. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1108798

Thompson, N., Mullins, A., & Chongsutakawewong, T. (2020). Does high e-government adoption assure stronger security? Results from a cross-country analysis of Australia and Thailand. *Government Information Quarterly*, *37*(1), 101408. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101408

Tumiwa, F. F., Sambiran, S., & Pati, A. B. (2021). Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten

Minahasa Selatan. *Governance*, *1*(2), 1–10. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/37618

Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. *Government Information Quarterly*, *36*(2), 167–178. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001

Ullah, A., Pinglu, C., Ullah, S., Abbas, H. S. M., & Khan, S. (2021). The Role of E-Governance in Combating COVID-19 and Promoting Sustainable Development: A Comparative Study of China and Pakistan. In *Chinese Political Science Review* (Vol. 6, Issue 1). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/s41111-020-00167-w

Yang, K., & Rho, S. Y. (2007). E-government for better performance: Promises, realities, and challenges. *International Journal of Public Administration*, *30*(11), 1197–1217. https://doi.org/10.1080/01900690701225556

Zorali, S., & Kanipek, K. (2023). An Empirical Research on the Determination of Effective Factors in E-Government Acceptance and Use: Northern Cyprus Case. *SAGE Open*, *13*(4), 2024. https://doi.org/10.1177/21582440231214092